

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul VASEKTOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM “Analisis Metode *Istinbat* Hukum Islam Terhadap Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana keputusan hasil Mukhtar Nahdlatul Ulama tahun 1989 tentang vasektomi dan bagaimana analisis metode *istinbat* hukum terhadap keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama tahun 1989 tentang vasektomi.

Penulisan penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif dengan teknik analisis berupa kajian kepustakaan (*library research*) dari sumber buku yaitu hasil keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama tahun 1989. Kemudian sumber tersebut disusun dengan deskriptis analisis untuk menemukan hasil sebuah analisis baru dari penjelasan sumber yang ada.

Dalam kasus ini penulis memahami adanya penyesuaian hukum tentang kasus vasektomi dari sisi sosiologis dan perkembangan medis di zaman sekarang, menurut keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama pada tahun 1989. Pertama perlu kita pahami mengenai keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa mengatur kelangkaan jumlah kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang dapat diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Kedua pembedaan obat seperti obat yang mencegah secara total dan obat yang mencegah sementara waktu, haram apabila obat yang mencegah secara total tidak akan kembali hamil, *mubah* hukumnya sama dengan *‘azl* (apabila mengeluarkan sperma diluar vagina). Dalam pengambilan keputusan tersebut, Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qauly* yakni mengambil hukum secara langsung dari kitab, untuk menentukan keabsahan tindakan vasektomi.

Dalam kasus tersebut, penulis telah memberikan saran bahwa Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar pula bagi masyarakat. Untuk itu, Nahdlatul Ulama diharapkan dapat meminimalisir adanya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aturan yang telah mengikat bagi warga di Indonesia seperti undang-undang agar tidak terjadi kerancuan persepsi setiap kalangan warga *Nahdliyyin* khususnya.